



The Adaptation of Balinese Transmigrant Houses to the Nawa Sanga Concept

Wildha Mardhatillah*¹, Mahyudi Usmar², Rizka Audina Papputungan³

Email: ¹wildhamrd@universitasgrahaedukasi.ac.id, ²Mahyudiusmar@universitasgrahaedukasi.ac.id,
³Rizkaaudina@universitasgrahaedukasi.ac.id

^{1,2,3} Universitas Graha Edukasi Makassar, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

Balinese communities have spread across many regions of Indonesia, largely through government-organized transmigration programs intended to redistribute the high population density of Bali. This movement inevitably confronts Balinese migrants with the challenge of adapting their spatial and architectural values, particularly the Tri Hita Karana philosophy and the Nawa Sanga/Sanga Mandala spatial concept, which are closely tied to the traditional caste (*catur wangsa*) system, to new physical and socio-cultural environments outside Bali. This study aims to examine how Balinese transmigrant communities adapt their dwelling patterns to the Tri Hita Karana and Nawa Sanga concepts, taking the case of Kertoraharjo Village, Tomoni Timur Sub-district, East Luwu Regency, South Sulawesi, a settlement established through the 1972-1973 transmigration program. A descriptive qualitative method was employed, combining field observation and documentation of housing layout with a literature review, and situating the findings within recent studies on Balinese vernacular architecture and caste-based social structure. The results show that the spatial arrangement of Balinese transmigrant houses in Kertoraharjo does not fully follow the normative orientation, building placement, and zoning hierarchy prescribed by Tri Hita Karana and Nawa Sanga. This deviation is driven by the community's socio-economic condition and by a shift in the meaning of caste, in which social status is now determined more by individual achievement than by hereditary caste rank. Nevertheless, the community still regards the east as the most sacred direction, consistently placing the family shrine (*pamerajan*) at the easternmost part of the house. These findings indicate that Balinese architectural adaptation in transmigration areas reflects a negotiation between inherited cosmological order and new socio-economic realities.

Keywords: Balinese House; Caste; Nawa Sanga; Transmigration; Tri Hita Karana

PENDAHULUAN

Masyarakat Bali tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar akibat tingginya kepadatan penduduk di daerah asal sehingga Bali menjadi salah satu target utama program transmigrasi pemerintah dalam mengatasi pemerataan penduduk. Berbeda dengan pola persebaran masyarakat Minangkabau yang didorong oleh budaya merantau, masyarakat Bajo dengan budaya melautnya, atau masyarakat Bugis dengan budaya berdagangnya, persebaran masyarakat Bali lebih banyak terjadi melalui kebijakan transmigrasi yang diatur dan didanai oleh pemerintah. Perpindahan ini membawa konsekuensi penting bagi masyarakat Bali sebagai kelompok yang sangat patuh terhadap nilai, norma, dan konsepsi ruang yang berlandaskan ajaran Hindu, khususnya konsep Tri Hita Karana dan Nawa Sanga/Sanga Mandala yang mengatur orientasi, zonasi, dan hierarki ruang permukiman serta rumah tinggal berdasarkan kedudukan kasta (*catur wangsa*). Ketika masyarakat Bali bermigrasi ke lingkungan fisik dan sosial-budaya yang berbeda di luar Bali, kemampuan mereka mempertahankan sekaligus menyesuaikan konsepsi ruang tersebut menjadi penentu penting keberlangsungan identitas budaya mereka di tempat baru.

Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsepsi ruang dan filosofi arsitektur Bali terus mengalami dinamika, baik di dalam maupun di luar Pulau Bali. Arini dan Paramita (2021) menegaskan bahwa seni arsitektur Bali senantiasa berpijak pada nilai filosofis Tri Hita Karana sebagai kerangka keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Pada permukiman tradisional yang relatif masih terjaga, seperti Desa Tenganan Pegringsingan, Aritama dkk. (2022) menemukan bahwa prinsip Tri Hita Karana masih tercermin dalam hierarki ruang parhyangan, pawongan, dan palemahan pada arsitektur vernakular setempat. Namun demikian, pada konteks perkotaan dan wilayah baru, penelitian Wijaya dkk. (2022) di Kota Denpasar memperlihatkan adanya dualisme dalam transformasi arsitektur rumah tinggal etnis Bali, ketika nilai tradisional harus beradaptasi dengan tuntutan lahan, ekonomi, dan gaya hidup modern. Adaptasi serupa turut ditemukan pada rumah tinggal Bali kontemporer di Kabupaten Gianyar, yang oleh Aryasutha dkk. (2024) telah mengalami penyesuaian bentuk dan bukaan bangunan demi kenyamanan termal, meski tetap berupaya mempertahankan karakter kebalian. Dari sisi sosial, kajian Sihombing (2022), Segara dan Kuckreja (2024), serta Masari dkk. (2023) menunjukkan bahwa sistem kasta (catur wangsa) di Bali tetap menjadi penanda identitas dan struktur otoritas keagamaan hingga saat ini, sekalipun secara praksis mobilitas sosial semakin banyak ditentukan oleh pencapaian individu dibandingkan hierarki kasta warisan.

Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mengenai adaptasi arsitektur dan pergeseran makna kasta pada masyarakat Bali umumnya masih terpusat pada wilayah Bali sendiri atau pada kajian sosial kasta secara umum, sebagaimana ditemukan pada penelitian awal Anwar (2016) tentang interaksi antar-kasta masyarakat transmigran di Desa Kertoraharjo. Penelitian tersebut lebih menyoroti dinamika interaksi sosial dan bahasa, namun belum secara khusus mengaitkannya dengan wujud fisik dan tata ruang rumah tinggal berdasarkan konsepsi Tri Hita Karana dan Nawa Sanga. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan kajian mengenai bagaimana konsepsi ruang tradisional Bali diterjemahkan secara spasial pada rumah tinggal masyarakat transmigran Bali di luar Pulau Bali, khususnya ketika berhadapan dengan pergeseran pemahaman kasta dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda dari daerah asal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adaptasi rumah masyarakat transmigran Bali berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang berkaitan dengan kasta, di luar Pulau Bali, khususnya pada permukiman masyarakat Bali di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan secara langsung wujud spasial rumah tinggal (orientasi, zonasi, dan peletakan bangunan) dengan pergeseran makna kasta pada komunitas transmigran Bali, suatu aspek yang belum banyak diungkap pada penelitian-penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai adaptasi rumah tinggal masyarakat transmigran Bali serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Populasi penelitian adalah masyarakat Bali penghuni permukiman transmigrasi di Desa Kertoraharjo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan subjek penelitian berupa rumah tinggal masyarakat Bali dari berbagai latar belakang kasta (catur wangsa) yang dipilih secara purposif untuk mewakili variasi kondisi sosial-ekonomi dan kasta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan terhadap pola tata letak dan orientasi bangunan, dokumentasi visual permukiman dan rumah tinggal, serta studi literatur mengenai konsepsi budaya dan arsitektur Bali. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan temuan empiris di lapangan terhadap norma konsepsi Tri Hita Karana dan Nawa Sanga/Sanga Mandala, untuk selanjutnya diinterpretasikan guna mengungkap pola adaptasi dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

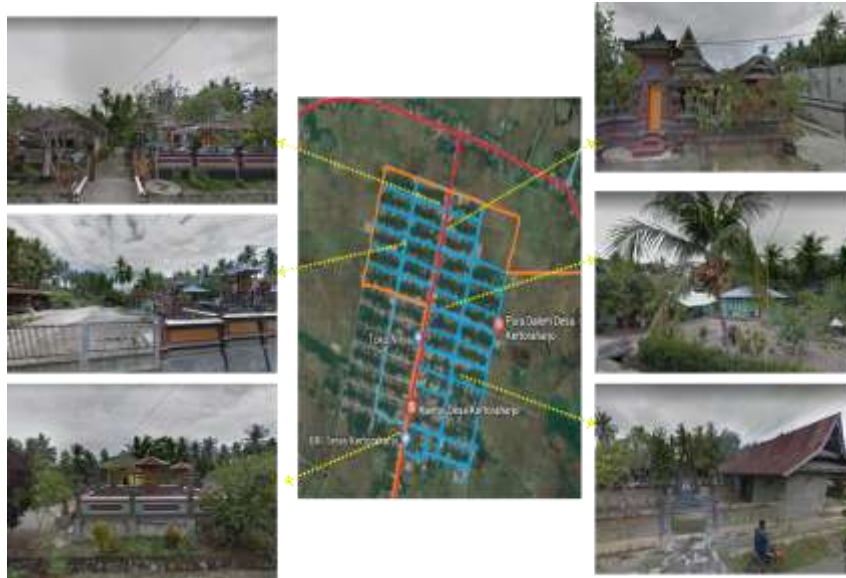
Desa Kertoraharjo terletak di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terbentuk sekitar empat puluh lima tahun lalu, ketika kawasan hutan di wilayah tersebut dijadikan lokasi program transmigrasi pemerintah pada tahun 1972 dan 1973. Sejumlah kelompok suku bangsa mengikuti program ini, di antaranya kelompok transmigran Bali dan Jawa yang berjumlah sekitar 500 keluarga dan ditempatkan di wilayah Kertoraharjo I, termasuk 400 keluarga masyarakat Bali yang seluruhnya beragama Hindu dan berasal dari berbagai kabupaten di Pulau Bali. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, permukiman masyarakat Bali di desa ini tersusun dalam pola blok-blok lahan yang relatif teratur, dengan fasilitas keagamaan seperti Pura Dalem Desa Kertoraharjo yang menjadi salah satu pusat orientasi sosial-keagamaan komunitas.



Gambar 1. Peta Lokasi dan Sebaran Permukiman Masyarakat Bali di Desa Kertoraharjo

Pola Orientasi dan Tata Ruang Rumah Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana dan Nawa Sanga

Konsep Tri Hita Karana mengatur keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan), yang pada rumah tradisional Bali diwujudkan melalui pembagian pekarangan atas bagian luan (persembahyangan), bagian tengah (tempat tinggal), dan bagian teben (penyimpanan dan pemeliharaan hewan). Prinsip ini berpadu dengan konsep Nawa Sanga/Sanga Mandala, yakni penggabungan orientasi bumi (gunung-laut) dan orientasi matahari (timur-barat) yang menghasilkan hierarki ruang utama, madya, dan nista sebagai dasar peletakan bangunan dan alokasi kegiatan (Aritama dkk., 2022; Arini & Paramita, 2021). Hasil pengamatan di Desa Kertoraharjo (Gambar 2) menunjukkan bahwa pola pengaturan rumah tinggal masyarakat Bali di desa ini tidak sepenuhnya mengikuti konsepsi tersebut secara normatif. Orientasi bangunan, peletakan massa, dan pembagian fungsi ruang lebih banyak menyesuaikan bentuk dan ukuran kavling transmigrasi yang telah ditentukan pemerintah, alih-alih mengikuti hierarki Nawa Sanga secara ketat. Meski demikian, elemen keagamaan berupa pamerajan (tempat suci keluarga) tetap konsisten diletakkan di sisi timur rumah, sejalan dengan temuan Aritama dkk. (2022) bahwa unsur parhyangan senantiasa menjadi elemen tertinggi dalam hierarki ruang meskipun elemen ruang lain mengalami penyesuaian.



Gambar 2. Dokumentasi Rumah dan Pamerajan Keluarga Masyarakat Bali di Desa Kertoraharjo

Pembahasan

Pergeseran Pemahaman Kasta dan Konsep Tri Hita Karana pada Masyarakat Transmigran

Pergeseran pola tata ruang rumah tinggal di Desa Kertoraharjo erat kaitannya dengan pergeseran pemahaman mengenai kasta (catur wangsa) pada komunitas transmigran Bali. Sebagaimana ditemukan Anwar (2016) dalam penelitiannya mengenai interaksi antar-kasta di Kertoraharjo, praktik kasta di wilayah transmigrasi telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan tatanan normatifnya di Bali. Realitas ini sejalan dengan kajian Sihombing (2022) dan Segara serta Kuckreja (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun sistem kasta masih dipertahankan sebagai penanda identitas dan otoritas keagamaan, penerapannya dalam kehidupan sosial sehari-hari semakin longgar dan kontekstual. Hal serupa dikonfirmasi oleh Masari dkk. (2023), yang menyatakan bahwa mobilitas sosial masyarakat Hindu Bali saat ini lebih banyak ditentukan oleh pencapaian pendidikan, ekonomi, dan jaringan sosial dibandingkan oleh kedudukan kasta warisan. Pada konteks Kertoraharjo, kondisi ini diperkuat oleh kenyataan bahwa kasta Sudra justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap kondisi alam pertanian dan perkebunan pada masa awal transmigrasi, sehingga status sosial ekonomi mereka berkembang lebih cepat dibandingkan sebagian kelompok kasta yang secara normatif berkedudukan lebih tinggi. Pergeseran inilah yang kemudian turut memengaruhi longgarnya penerapan hierarki ruang berbasis kasta pada rumah tinggal mereka, sebagaimana juga diperlihatkan oleh dualisme transformasi arsitektur rumah tinggal etnis Bali pada penelitian Wijaya dkk. (2022) di Denpasar.

Faktor Sosial-Ekonomi dan Konsistensi Orientasi Sakral Timur

Selain faktor pergeseran kasta, kondisi sosial-ekonomi masyarakat transmigran turut menjadi faktor utama penyebab tidak sepenuhnya diterapkannya konsep Tri Hita Karana dan Nawa Sanga secara normatif pada rumah tinggal di Kertoraharjo. Keterbatasan lahan hasil pembagian program transmigrasi, keterbatasan biaya pembangunan, serta kebutuhan fungsional rumah tangga menjadi pertimbangan yang lebih mendesak dibandingkan pemenuhan hierarki ruang tradisional secara ketat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aryasutha dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa rumah tinggal Bali kontemporer, sekalipun berada di Bali sendiri, kerap mengalami penyesuaian bentuk bangunan demi efisiensi dan kenyamanan, tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai kebalian. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa satu prinsip tetap dipegang teguh oleh hampir seluruh keluarga Bali di Kertoraharjo, yaitu keyakinan bahwa arah timur merupakan arah paling sakral dan suci. Hal ini

konsisten terlihat dari peletakan pamerajan yang selalu berada pada posisi paling timur dari keseluruhan bangunan rumah, menunjukkan bahwa dimensi spiritual (parhyangan) dalam konsep Tri Hita Karana merupakan unsur yang paling resisten terhadap perubahan dibandingkan unsur pawongan dan palemahan yang lebih fleksibel menyesuaikan kondisi sosial-ekonomi setempat.

KESIMPULAN

Rumah tinggal masyarakat transmigran Bali di Desa Kertoraharjo menunjukkan pergeseran dari ketentuan normatif Tri Hita Karana dan Nawa Sanga, terutama pada aspek orientasi bangunan, perletakan massa, dan pembagian fungsi ruang, yang lebih banyak menyesuaikan kondisi lahan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dibandingkan mengikuti hierarki ruang berbasis kasta secara ketat. Pergeseran ini juga berkaitan erat dengan bergesernya pemahaman mengenai kasta, di mana status sosial di desa tersebut kini lebih ditentukan oleh capaian individu, khususnya kemampuan adaptasi kasta Sudra terhadap kondisi pertanian di lingkungan baru, dibandingkan oleh kedudukan kasta warisan. Meskipun demikian, unsur spiritual berupa orientasi sakral ke arah timur tetap dipertahankan secara konsisten melalui peletakan pamerajan pada bagian timur rumah, yang menunjukkan bahwa dimensi parhyangan dalam Tri Hita Karana menjadi unsur budaya yang paling bertahan di tengah proses adaptasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah kajian yang hanya mencakup satu desa transmigrasi, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah pada beberapa permukiman transmigran Bali lainnya di luar Pulau Bali guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola adaptasi arsitektur dan pergeseran kasta. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan tokoh adat setempat dalam merumuskan pedoman tata ruang permukiman yang tetap mengakomodasi nilai spiritual Tri Hita Karana tanpa mengabaikan keterbatasan lahan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat transmigran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar. (2016). 'Ini kan bukan Bali': Interaksi antar-kasta masyarakat transmigran di Desa Kertoraharjo, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 1(2), 1-11.
- Arini, I. A. D., & Paramita, I. B. G. (2021). Seni arsitektur Bali dalam bangunan-bangunan Bali (Kajian filosofis). *Maha Widya Duta*, 5(1), 76-87.
- Aritama, A. A. N., Laskara, G. W., & Satria, M. W. (2022). Identification of green architectural characteristics of Tenganan Pegringsingan Village, Karangasem, Bali. *ASTONJADRO*, 11(2), 458-467. <https://doi.org/10.32832/astonjadro.v11i2.6770>
- Aryasutha, I. M. K., Wendyputra, I. P. W., Yudiantini, N. M., & Ramadhan, T. (2024). Optimalisasi kenyamanan termal rumah tinggal Bali kontemporer di Kabupaten Gianyar. *Arsitektura: Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*, 22(2), 231-240.
- Masari, N. K., Sukerno, E., Wijaya, W. A., Juniardika, I. W., & Mustika, G. (2023). Sistem kasta dalam agama Hindu dan implikasinya terhadap mobilitas sosial di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 317-324. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.873>
- Santi, S., & Syukur, L. A. (2010). Adaptasi arsitektur tradisional Bali pada rumah masyarakat suku Bali di luar Pulau Bali. *Unity: Jurnal Arsitektur*, 1(1), 62.
- Segara, I. N. Y., & Kuckreja, R. (2024). The social stratification system in forming a Balinese identity. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 14(1), 1-18. <https://doi.org/10.24843/JKB.2024.v14.i01.p01>
- Sihombing, L. H. (2022). The significance of the caste system of Balinese in the modern era:

- A discourse of cultural communication. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 14(2), 146-156.
- Wijaya, I. K. M., Warnata, I. N., & Mustika, N. W. M. (2022). Dualism in the transformation of Balinese ethnic residential architecture in Denpasar. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 7(3), 289-300. <https://doi.org/10.30822/arteks.v7i3.1225>
- Yanto, N. (2011). Rumah berdasarkan kasta. *Neraca*. <http://www.neraca.co.id/article/7150/rumah-berdasarkan-kasta>